

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, migrasi tenaga kerja telah menjadi fenomena yang semakin umum dan signifikan di seluruh dunia. Peningkatan mobilitas manusia antar negara dan daerah telah mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengelola arus migrasi ini. Kebijakan migrasi tenaga kerja dirancang untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari migrasi, sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Di Indonesia, kebijakan migrasi tenaga kerja mengalami berbagai perubahan seiring dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam pasar tenaga kerja domestik. Sejak beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja migran, mengatur penempatan tenaga kerja, dan melindungi hak-hak pekerja migran. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial serta memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak di negara tujuan mereka. Namun, meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, seperti pelanggaran hak-hak pekerja, kesulitan dalam penempatan, dan dampak terhadap ekonomi lokal.

Kebijakan migrasi tenaga kerja melibatkan berbagai aspek, mulai dari perekrutan, penempatan, perlindungan hak-hak pekerja, hingga reintegrasi pekerja migran ke daerah asal mereka. Evaluasi kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif. Evaluasi juga membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Migrasi tenaga kerja adalah fenomena global yang telah menjadi bagian integral dari dinamika pasar tenaga kerja internasional. Proses ini melibatkan pergerakan individu dari satu negara ke negara lain untuk mencari pekerjaan

atau peluang ekonomi yang lebih baik. Dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, migrasi tenaga kerja sering kali dianggap sebagai strategi yang efektif untuk mengatasi kekurangan keterampilan, memanfaatkan peluang baru, dan mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan migrasi tenaga kerja untuk mengatur aliran tenaga kerja asing dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari migrasi dapat dirasakan secara maksimal. Evaluasi terhadap kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tersebut tercapai dan dampaknya terhadap ekonomi serta masyarakat dapat diukur secara akurat.

Evaluasi kebijakan migrasi tenaga kerja di berbagai negara. Para ahli telah menyoroti beberapa isu penting seperti perlindungan hak-hak pekerja migran, dampak ekonomi dari migrasi, serta proses reintegrasi yang sering kali kurang mendapat perhatian. Misalnya, studi oleh Ruhs dan Martin (2018) menekankan pentingnya regulasi yang seimbang untuk melindungi pekerja migran sambil tetap mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja domestik. Selain itu, penelitian oleh Wickramasekara (2019) menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja migran harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan migrasi, terutama bagi pekerja migran yang bekerja di sektor informal.

Kebijakan migrasi tenaga kerja di luar negeri, khususnya di Malaysia, perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat optimal bagi para pekerja dan negara asal. Evaluasi ini penting mengingat berbagai isu yang muncul terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja migran, kondisi kerja, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan.

Menurut Rahman (2020), perlindungan hukum dan kebijakan yang komprehensif perlu diperkuat untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan pelanggaran hak. Senada dengan itu, studi oleh Saraswati (2019) menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pekerja migran. Di sisi lain, penelitian oleh Abdullah (2018) menunjukkan bahwa

kebijakan migrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja migran serta memberikan kontribusi positif bagi kedua negara.

Evaluasi kebijakan migrasi tenaga kerja di Malaysia tidak hanya penting dari perspektif perlindungan pekerja, tetapi juga dari sudut pandang ekonomi. Studi oleh Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa remitansi dari pekerja migran memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung dan melindungi pekerja migran di luar negeri dapat memberikan dampak positif yang luas, baik secara ekonomi maupun sosial.

Migrasi tenaga kerja merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh banyak negara untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nias, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, memiliki potensi besar dalam menyediakan tenaga kerja yang siap untuk bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia. Program migrasi tenaga kerja ini dijalankan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias dengan tujuan utama mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Berdasarkan UU. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU. 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perlindungan pekerjaan Migran Indonesia. PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pekerja Migran Indonesia. PDERMENPARB Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Kemudian PERMENAKETRANS No. 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan. Dan terakhir PERDA Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias.

Kabupaten Nias menghadapi tantangan besar dalam hal pengangguran dan kekurangan lapangan pekerjaan. Sektor pertanian yang dominan di daerah ini tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada. Oleh

karena itu, migrasi tenaga kerja menjadi alternatif yang menjanjikan untuk mengatasi permasalahan ini. Malaysia, sebagai salah satu tujuan utama migrasi tenaga kerja dari Nias, menawarkan peluang kerja yang lebih baik di berbagai sektor, seperti perkebunan, konstruksi, dan manufaktur. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah Malaysia dalam memfasilitasi pengiriman tenaga kerja ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan menunjukkan hasil yang signifikan dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Nias.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), serta urusan perdagangan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Nias. Dinas ini berperan penting dalam memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan bimbingan kepada pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Selain itu, Dinas ini juga bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan regulasi terkait ketenagakerjaan, seperti perlindungan hak-hak pekerja dan penciptaan kesempatan kerja. Melalui berbagai program dan kebijakan, Dinas ini berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memfasilitasi pengembangan usaha dan mengoptimalkan potensi tenaga kerja lokal. Berikut adalah tabel mengenai migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dari tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 1.1

Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia dari Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Migrasi Tenaga Kerja	Laki-laki	perempuan	Nama Perusahaan Tujuan	Tujuan
2020	13 Orang	6	7	Winsheng Plastic Industry SDN BHD	Malaysia
				Felcra Berhand	
				Hartalega SDN BHD	
				Winsheng Plastic Industry SDN BHD	
2021	5 Orang	2	3	Valeo CDA SDN BHD	Malaysia

				II-IV Advance Manufacturing Center SDN BHD	
				Coherent SDN BHD	
				ANCS SDN BHAD	
				Valeo CDA SDN BHD	
2022	9 Orang	1	8	Inari Technology SDN BHD	Malaysia
				Winsheng Plastic Industry SDN BHD	
				SQA Builders SDN BHD	
				II-IV Advance Manufacturing Center SDN BHD	
				Valeo CDA SDN BHD	
2023	9 Orang	5	4	Intan Bina SDN BHD	Malaysia
				Coherent SDN BHD	
				Sime Darby Plantation Sarawak SDN BHD	
				Plexus Manufacturing SDN BHD	
				Felcra Berhand	
				Hartalega SDN BHD	
2024	2 Orang	1	1	ANCS SDN BHAD	Malaysia
				Coherent SDN BHD	
				Valeo CDA SDN BHD	
				Winsheng Plastic Industry SDN BHD	

Sumber: Dinas UKM serta Ketenagakerjaan Kab. Nias, 2024

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan peran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias dalam memperbaiki kebijakan migrasi tenaga kerja ke Malaysia. Dan berdasarkan pra wawancara peneliti kepada calon pekerja migran mengatakan bahwa akan mengumpulkan niat untuk bekerja ke malaysia sesuai proses yang ada dan kesimpulan yang belum di terealisasikan dengan baik. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di Nias, terdapat tantangan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan migrasi tenaga kerja

melalui berbagai upaya, seperti penyediaan pelatihan keterampilan yang relevan untuk calon pekerja migran. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja di Malaysia, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, dinas juga bertanggung jawab untuk menyederhanakan proses administrasi dan persyaratan migrasi. Dengan mengurangi kompleksitas birokrasi, dinas dapat memfasilitasi calon pekerja migran dalam memenuhi dokumen yang diperlukan, mengurangi potensi keterlambatan, dan meminimalkan risiko kegagalan penempatan kerja. Melalui program pengembangan UKM, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias juga dapat memberdayakan keluarga tenaga kerja migran dengan memberikan dukungan ekonomi di daerah asal, sehingga keberangkatan pekerja migran dapat menjadi lebih terencana dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terpadu, peran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias, dan Ketenagakerjaan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas migrasi tenaga kerja dan dampaknya terhadap masyarakat Nias.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Evaluasi Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Dari Nias Ke Malaysia Studi Kasus di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dalam latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja dari Nias ke Malaysia
2. Kualitas Pelatihan dan Dukungan untuk Calon Pekerja Migran
3. Penilaian Proses Administrasi dan Persyaratan Migrasi

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias dalam kebijakan migrasi tenaga kerja ke Malaysia?
2. Bagaimana program pengembangan UKM dapat memberdayakan keluarga pekerja migran dan mendukung keberlanjutan migrasi tenaga kerja?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan migrasi tenaga kerja dari Nias ke Malaysia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias dalam memperbaiki kebijakan migrasi tenaga kerja ke luar negeri, khususnya Malaysia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis program pengembangan UMM dapat memberdayakan keluarga pekerja migran dan mendukung keberlanjutan migrasi tenaga kerja
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan migrasi tenaga kerja dari Nias ke Malaysia

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai efektivitas kebijakan migrasi tenaga kerja, khususnya dalam konteks daerah tertentu seperti Nias, serta menambah wawasan peneliti mengenai dinamika kebijakan migrasi di negara berkembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan keterampilan dalam melakukan evaluasi kebijakan, analisis data, serta penyusunan rekomendasi berbasis bukti.

b. Bagi Universitas Nias

Penelitian ini dapat membuka peluang bagi universitas untuk berkolaborasi dengan pemerintah lokal dan lembaga lainnya dalam implementasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian.

c. Bagi Lokasi Penelitian

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias untuk mengevaluasi kebijakan migrasi tenaga kerja guna mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis mengenai tantangan dan solusi dalam evaluasi kebijakan migrasi, serta memfasilitasi studi lanjutan dengan informasi dan data yang relevan.